

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP
PENCEGAHAN *FRAUD* DI BANK PERKREDITAN RAKYAT
(STUDI PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT DI SURABAYA)**

Sitti Fitratul Jannah

Jurusan S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Sittifitratuljannah@gmail.com

Abstrak

BPR memiliki kecenderungan lebih berisiko tersandung permasalahan karena jumlahnya lebih banyak daripada bank umum. Pernyataan ini didukung dengan banyaknya jumlah BPR yang dilikuidasi, yaitu sebanyak 70 BPR dari tahun 2005-2016 dengan hampir 70% alasan dilikuidasi adalah tindakan *fraud* oleh manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud* BPR di Surabaya yang *listing* di Bank Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari seluruh karyawan (kecuali bagian keamanan dan kebersihan) BPR di Surabaya yang *listing* di Bank Indonesia sebanyak 186 karyawan. Sampel diambil dengan menggunakan total sampling sehingga total sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 186 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* BPR di Surabaya yang *listing* di Bank Indonesia. Penerapan prinsip *Good corporate governance* oleh Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya menunjukkan nilai yang sangat tinggi yang berarti penerapan *Good corporate governance* sudah sangat baik. Begitu pula pencegahan *fraud* BPR di Surabaya juga menunjukkan nilai yang sangat tinggi yang berarti pencegahan *fraud* BPR di Surabaya juga telah dilakukan dengan sangat baik.

Kata Kunci: Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Pencegahan *Fraud*, BPR.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

BPR sangat memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu meningkatkan pembiayaan usaha utamanya bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), karena selama ini UMKM ini sangat memerlukan suntikan modal dari pihak luar (Azriani, *dkk.* 2008). Tujuan umum BPR adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, termasuk masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota, serta kepada pengelola UMKM, sehingga BPR sangat diharapkan meningkatkan peran dan kontribusinya pengembangan UMKM (Putri, *dkk.* 2016). Peran penting yang dimiliki BPR tersebut menjadikan masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya di BPR dan telah ditunjukkan dengan

tingginya jumlah dana yang dihimpun BPR dan jumlah dana yang disalurkan BPR yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan BPR

Tahun	Dana yang dihimpun	Dana yang disalurkan
2012	54.397.435.142	64.753.088.638
2013	63.105.715.599	74.522.813.622
2014	73.540.925.473	86.910.838.059
2015	82.922.192.839	98.289.920.516
2016 (31/11)	90.140.368.995	107.025.524.786

Sumber : Bank Indonesia, diolah (2016)

Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya masyarakat, BPR seharusnya tidak melakukan tindakan yang akan menghilangkan kepercayaan masyarakat tersebut. Namun, fakta yang terjadi bahwa BPR telah banyak melakukan *fraud*. *Fraud* yang terjadi mayoritas berada pada pemberian kredit fiktif, deposito fiktif, penggelapan angsuran kredit, rekayasa pemberian kredit, penggelapan hasil penjualan AYDA (Perbarindo, 2016). Menurut Enggi Gilkar, Kepala Bagian Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPR cenderung lebih berisiko tersandung permasalahan (*probability of default*) bila dibandingkan dengan bank umum karena jumlahnya lebih banyak (Yoga, 2016). Berikut adalah data statistik mengenai jumlah BPR di Indonesia:

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah BPR Periode 2008 – 2016

Tahun	Jumlah BPR
2008	1.771
2009	1.733
2010	1.706
2011	1.669
2012	1.653
2013	1.634
2014	1.643
2015	1.644
2016 (Per 31 April)	1.641

Sumber: Bank Indonesia, diolah (2016)

Jumlah BPR dari tahun 2008 hingga tahun 2016 mengalami fluktuasi. Namun jumlahnya sangat jauh dibandingkan dengan jumlah bank umum yang ada, sejumlah 119 bank umum menurut data OJK per 31 Desember 2015. Selain *fraud* disebabkan karena jumlah BPR, terdapat beberapa tantangan besar yang dapat memungkinkan menjadi faktor terjadinya *fraud*. Terdapat 6 (enam) tantangan yang harus diantisipasi BPR (Perbarindo, 2016), antara lain: (1) Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). (2) Kucuran Kredit Usaha

rakyat (KUR) dengan plafon Rp. 100.000.000.000 dengan bunga 9%. (3) Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor). (4) Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). (5) Kewajiban penyaluran kredit UMKM oleh bank umum (6) Persaingan dengan lembaga keuangan lain.

Pernyataan bahwa BPR cenderung lebih berisiko tersandung *probability of default* didukung dengan adanya fakta bahwa dari tahun 2005 hingga tahun 2016, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melikuidasi sebanyak 71 Bank yang terdiri dari 70 BPR dan 1 Bank Umum dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data BPR yang Dilikuidasi

Tahun	Jumlah BPR yang dilikuidasi
2005	1
2006	6
2007	5
2008	4
2009	6
2010	10
2011	14
2012	1
2013	9
2014	6
2015	3
2016	5
Total	70

Sumber : Lembaga Penjamin Simpanan, Diolah (2016)

Bank Indonesia menyatakan bahwa hampir 70% BPR yang di cabut izin usahanya disebabkan karena *fraud* (Banjarnahor, 2011). Selain itu, menurut data Perbarindo, 81% dari jumlah BPR keseluruhan melakukan tindak *fraud* sehingga faktor dominan yang menyebabkan BPR dilikuidasi adalah *fraud*. Menurut Deputi Komisioner Pengawas II OJK, *fraud* di BPR disebabkan karena pengurus BPR belum melaksanakan GCG dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, OJK mendorong BPR untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) yang tertuang dalam POJK No. 4 Tahun 2015 tentang penerapan tata kelola yang baik bagi BPR (Yoga, 2016). Menurut peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum, *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh negatif terhadap *fraud* di perusahaan BUMN (Setiawan, 2016). Artinya, pelaksanaan GCG yang

baik akan menjauhkan perusahaan BUMN dari praktik *fraud*. Begitu pula pada bank umum, semakin tinggi kualitas pelaksanaan GCG, maka potensi terjadinya *fraud* akan semakin rendah (Indriastuti dan Ifada, 2011). Penelitian terhadap SKPD Pemerintah Daerah juga menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* (Soleman, 2013). Sehingga, Berangkat dari fakta ini, peneliti termotivasi untuk meneliti **“Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Pencegahan *Fraud* di Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *Good Governance* adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Sari dkk, 2015).

Bank Indonesia menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola bank melalui penerapan beberapa prinsip, yaitu:

- a. *Transparency* (Keterbukaan), yaitu prinsip yang menjunjung keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang material secara memadai, tepat waktu dan akurat serta keterbukaan perusahaan dalam pengambilan keputusan.
- b. *Accountability* (Akuntabilitas), yaitu prinsip yang menuntut adanya kejelasan fungsi atau pemisahan tugas dan pelaksanaan tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan sehingga perusahaan dapat dikelola dengan baik.
- c. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), yaitu prinsip yang mengharuskan agar pengelolaan perusahaan sesuai dan patuh terhadap prinsip korporasi yang sehat dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Independency* (Kemandirian), yaitu prinsip yang mengharuskan pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun.
- e. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran), yaitu prinsip yang menuntut pemenuhan hak-hak pemegang saham secara adil dan setara sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kecurangan (*Fraud*)

Menurut *International Standards on Auditing* (ISA) seksi 240 tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangan *fraud* dalam audit laporan keuangan, *fraud* didefinisikan sebagai perbuatan yang disengaja oleh seseorang atau beberapa orang diantara manajemen, TCWG (*Those Charge With Governance*), pegawai, atau pihak ketiga, dengan menipu untuk memperoleh keuntungan yang tidak dapat dibenarkan atau yang tidak sah/melawan hukum (Tuanakotta, 2014:308). *Fraud* dapat terjadi karena beberapa faktor. Albrecht *et al.* (2012:34) menjelaskan bahwa *fraud* dapat terjadi karena 3 kondisi (*fraud triangle*), yaitu:



Sumber: Albrecht *et al.* (2012)

Gambar 2.1. *Fraud Triangle*

Tekanan (*Perceived pressure*) akan menyebabkan situasi dimana seseorang atau sekelompok orang terdorong untuk melakukan *fraud*. Tekanan ini bisa disebabkan karena sifat serakah, kebutuhan keluarga yang harus segera terpenuhi, ketidakpuasan karyawan terhadap dunia kerjanya, dll. Motif selanjutnya adalah peluang (*Perceived opportunity*). Peluang adalah kondisi dimana seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan *fraud*. Biasanya peluang ini muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal perusahaan. Peluang juga bisa berawal dari tekanan atau dorongan dari dalam diri seseorang sehingga mencari peluang untuk melaksanakan kecurangan tersebut.

Motif yang terakhir adalah rasionalisasi, yaitu pikiran seseorang yang membenarkan tindakan *fraud* yang dilakukannya. Pikiran ini biasanya muncul karena ia melihat orang lain dalam organisasinya melakukan *fraud* namun mereka tidak mendapat hukuman dari perbuatannya itu. Selain itu, pikiran ini juga dapat muncul karena menurut mereka, aset yang mereka ambil adalah memang hak mereka karena mereka telah memberikan kontribusi atau jasa bagi perusahaan.

Pencegahan *Fraud* (*Fraud Prevention*)

Menurut Sudarmo dkk (2009:37), Pencegahan *fraud* adalah upaya terintegrasi yang dilakukan agar penyebab terjadinya *fraud* (*fraud triangle*) dapat ditekan yaitu melalui upaya dibawah ini:

- a. Meminimalisir adanya peluang (*opportunity*) untuk melakukan *fraud*.
- b. Menurunkan tekanan (*pressure*) pada setiap organ perusahaan agar ia mampu memenuhi kebutuhannya.
- c. Mengeliminasi munculnya rasa rasionalisasi (*rasionalization*) yang memunculkan alasan pembenaran atas tindakan kecurangan yang dilakukan.

Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penerapan Prinsip-Prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di Bank Perkreditan Rakyat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan sumber data berupa data primer melalui penyebaran kuisioner. Kuisioner berisi daftar-daftar pertanyaan dari masing-masing variabel penelitian dan setiap item pernyataan diukur menggunakan skala *likert* dengan rentang jawaban 1-5. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan (kecuali bagian keamanan dan kebersihan) BPR di Surabaya yang *listing* di Bank Indonesia sebanyak 186 karyawan. Sampel penelitian menggunakan metode *total sampling* sehingga jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 186 karyawan.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel GCG yang diukur dengan menggunakan lima indikator yang merupakan prinsip-prinsip dari GCG. Sedangkan variabel dependen, yaitu pencegahan *fraud* diukur melalui cara-cara mencegah terjadinya tindak kecurangan.

Tabel 3.2 Operasionalisasi variabel Independen

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
<i>Good Corporate Governance</i> (X)	<i>Transparency</i>	1. Perusahaan menyediakan informasi mengenai data keuangan dan non-keuangan melalui <i>homepage</i> atau media secara akurat, tepat waktu, dan mudah untuk diakses oleh para <i>stakeholders</i> atau publik. 2. Perusahaan terbuka dalam pengambilan keputusan 3. Nasabah memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi pelayanan perusahaan.	Ordinal

		4. Meskipun menganut prinsip keterbukaan, perusahaan tetap memelihara kerahasiaan informasi perusahaan dan hak-hak pribadi perusahaan.	
<i>Accountability</i>		1. Perusahaan menetapkan tanggung jawab masing-masing karyawan sesuai jabatan dengan jelas dan selaras dengan tujuan perusahaan. 2. Perusahaan menerapkan sistem <i>reward and punishment</i> sebagai ukuran kinerja karyawan. 3. Setiap karyawan berkompetensi sesuai dengan jabatan dan tanggung jawabnya masing-masing.	Ordinal
<i>Responsibility</i>		1. Perusahaan dijalankan dengan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential principle</i>) serta patuh terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. 2. Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.	Ordinal
<i>Independency</i>		1. Semua organ (karyawan) perusahaan bekerja secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan atau tekanan dari pihak manapun. 2. Perusahaan memiliki sistem dan pedoman kerja agar aktifitas perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. 3. Semua organ (karyawan) perusahaan bekerja sesuai dengan pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan. 4. Perusahaan melaksanakan tugas sesuai anggaran dasar yang telah ditetapkan.	Ordinal
<i>Fairness</i>		1. Seluruh pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) di perusahaan diperlakukan dengan adil dan setara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. 2. Seluruh pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) di perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk memberi pendapat atau masukan. 3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, karir karyawan dan setiap organ perusahaan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa memandang SARA.	Ordinal

Sumber : Yudokusumo (2014)

Tabel 3.3 Operasionalisasi variabel Dependen

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	Penetapan kebijakan anti <i>fraud</i>	1. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. 2. Adanya komitmen dari setiap organ perusahaan. 3. Penerapan budaya kerja yang jujur dan bernilai etika tinggi bagi setiap organ perusahaan.	Ordinal
	Prosedur Pencegahan Baku	1. Adanya prosedur yang memadai untuk melaporkan <i>fraud</i> yang ditemukan. 2. Menindak individu yang terlibat <i>fraud</i> secara konsisten.	Ordinal
	Organisasi	1. Adanya komite audit yang independen. 2. auditor internal melakukan evaluasi secara	Ordinal

	berkala atas aktivitas organisasi secara berkesinambungan.	
Teknik	1. Pembagian tugas yang jelas.	Ordinal
Pengendalian	2. Pengawasan terhadap tindakan karyawan.	
Kepekaan	1. Setiap karyawan memiliki kompeten di bidangnya.	Ordinal
Terhadap Fraud	2. karyawan diberi kesempatan untuk mencurahkan pendapat di perusahaan.	

Sumber : Sudarmo, dkk. (2009:38)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Distribusi kuesioner dalam penelitian ini disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1. Tabel Distribusi Kuisisioner

No	Keterangan	Jumlah Kuisisioner	persentase
1	Distribusi kuisisioner	186	100%
2	Kuisisioner yang kembali	137	73,7 %
3	Kuisisioner yang tidak kembali	49	26,3 %
4	Kuisisioner yang dapat diolah	137	73,7 %

n sampel = 186
responden rate = $137/186 = 73,7 \%$

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dari variabel-variabel penelitian. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif secara keseluruhan yang ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2. Tabel Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian

Variabel Penelitian	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
<i>Good corporate governance</i>	36	75	68,15	4,125
Pencegahan <i>Fraud</i>	22	55	47,18	3,218

Sumber : Data Primer Diolah (2016)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa GCG memiliki nilai minimum 36 dan nilai maksimum 75 dengan nilai *mean* 68,15 dan standar deviasi 4,125. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di BPR di Surabaya yang *listing* di Bank Indonesia berada pada tingkat penerapan GCG yang sangat tinggi.

Disisi lain, variabel pencegahan *fraud* menunjukkan nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 55 serta nilai *mean* 47,18 dan standar deviasi 3,218. Artinya, pencegahan *fraud* BPR di Surabaya yang terdaftar di Bank Indonesia menunjukkan tingkat pencegahan *fraud* yang sangat tinggi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Menurut Ghozali (2009:49), validitas dapat menunjukkan apakah instrumen penelitian yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas data dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} . Item pernyataan dalam kuisioner dikatakan valid apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berikut hasil uji validitas dari masing-masing variabel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Variabel *Good Corporate Governance*

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
X.1.1	0,213	0,1678	Valid
X.1.2	0,491	0,1678	Valid
X.1.3	0,171	0,1678	Valid
X.1.4	0,530	0,1678	Valid
X.2.1	0,625	0,1678	Valid
X.2.2	0,483	0,1678	Valid
X.2.3	0,581	0,1678	Valid
X.3.1	0,531	0,1678	Valid
X.3.2	0,390	0,1678	Valid
X.4.1	0,603	0,1678	Valid
X.4.2	0,607	0,1678	Valid
X.4.3	0,598	0,1678	Valid
X.4.4	0,568	0,1678	Valid
X.5.1	0,562	0,1678	Valid
X.5.2	0,450	0,1678	Valid
X.5.3	0,472	0,1678	Valid

Sumber : Data primer diolah (2016)

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap item pernyataan mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} Sehingga semua item pernyataan dinyatakan valid dan dapat dijadikan alat ukur variabel *good corporate governance* dalam penelitian.

Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Pencegahan *Fraud*

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Kesimpulan
Y.1.1	0,556	0,1678	Valid
Y.1.2	0,506	0,1678	Valid
Y.1.3	0,563	0,1678	Valid
Y.2.1	0,581	0,1678	Valid
Y.2.2	0,666	0,1678	Valid
Y.3.1	0,590	0,1678	Valid
Y.3.2	0,605	0,1678	Valid
Y.4.1	0,627	0,1678	Valid
Y.4.2	0,547	0,1678	Valid
Y.5.1	0,577	0,1678	Valid
Y.5.2	0,482	0,1678	Valid

Sumber : Data primer diolah (2016)

tabel diatas juga menjelaskan bahwa setiap item pernyataan mempunyai nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} Sehingga semua item pernyataan dinyatakan valid dan dapat dijadikan alat ukur variabel pencegahan *fraud* dalam penelitian.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas dari suatu instrumen adalah apabila instrumen dapat menunjukkan konsistensi jawaban dari para responden terhadap pernyataan dalam kuesioner ketika mengukur gejala atau obyek yang sama. Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60 (Ghozali, 2009:46).

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
<i>Good corporate governance</i>	0,834	0,60	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i>	0,846	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer diolah (2016)

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tujuan analisis regresi adalah mengukur kekuatan hubungan dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 2009:86). Analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana.

Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model		Coefficients ^a			t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Lower Bound	Upper Bound
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8,179	3,116		2,625	,010	2,016	14,341
	GCG	,572	,046	,734	12,540	,000	,482	,663

a. Dependent Variable: PencegahanFraud

Sumber: Data Primer Diolah (2016)

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diatas, didapatkan persamaan regresi seperti berikut ini:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 8,179 + 0,572 X$$

1. Konstanta (*Constant*) = 8,179. Artinya, apabila nilai dari variabel GCG bernilai 0, maka variabel pencegahan *fraud* BPR di Surabaya yang terdaftar di BI tetap ada sebesar 8,179.
2. Koefisien (b) = 0,572 yang menunjukkan nilai positif. Artinya, antara variabel GCG dengan variabel pencegahan *fraud* memiliki hubungan yang berbanding lurus atau linear. Apabila GCG mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka pencegahan *fraud*

BPR di Surabaya yang *listing* di Bank Indonesia akan mengalami peningkatan sebesar 0,572 satuan.

Uji Hipotesis

Uji signifikansi parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji ini, maka akan diketahui apakah variabel *good corporate governance* secara parsial berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel pencegahan *fraud*.

Tabel 4.7 Hasil Penghitungan Uji t pada Taraf Signifikan 0,05

		Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95,0% Confidence Interval for B	
	B	Std. Error	Beta	Lower Bound			Upper Bound	
1	(Constant)	8,179	3,116		2,625	,010	2,016	14,341
	GCG	,572	,046	,734	12,540	,000	,482	,663
a. Dependent Variable: PencegahanFraud								

a. Dependent Variable: PencegahanFraud

Sumber : Data Primer Diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 12,540 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1.97769. Artinya, nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga H_0 ditolak (Ha diterima). Dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya.

Pembahasan

Secara teori, diterapkannya prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik oleh perusahaan akan dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Hal ini tidak hanya berlaku bagi BPR, beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa BUMN, SKPD, ataupun bank umum dapat mencegah dan mengurangi terjadinya *fraud* dengan diterapkannya *good corporate governance*.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* ini telah diterapkan dengan baik oleh BPR di Surabaya dan terbukti mampu menjaga eksistensi dan membuat BPR mampu bersaing dengan bank lain yang ukurannya lebih besar. Didukung dengan adanya bukti bahwa beberapa BPR di Surabaya ini mendapatkan penghargaan seperti BPR Surya Artha Utama yang memperoleh predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2010-2013 dari *Infobank*, Bank BPR Jatim yang juga memperoleh penghargaan *golden award* dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2010-2014 dari

Infobank. Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam BPR secara berkesinambungan akan mampu mencegah BPR dari terjadinya *fraud* BPR sesuai dengan penjelasan di bawah ini:

1. *Transparency*. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk lebih mempertanggungjawabkan informasi yang dibutuhkan investor agar mereka mempercayakan dananya di BPR. Untuk mengemukakan informasi perusahaan yang memadai, akurat, serta tepat waktu, diperlukan kinerja perusahaan yang baik. Selain itu, peran auditor eksternal untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan perusahaan bebas dari kesalahan material akan meminimalisir munculnya peluang (*opportunity*) untuk melakukan *fraud*.
2. *Accountability*. Prinsip ini meminimalisir adanya peluang (*opportunity*) untuk melakukan *fraud* dan juga meminimalisir munculnya rasionalisasi karena setiap komponen perusahaan telah mendapatkan haknya masing-masing. Selain itu, BPR akan terhindar dari penyalahgunaan wewenang, penyimpangan serta kecurangan karena tidak ada rangkap jabatan atau *mismanagement* di perusahaan yang dapat memicu terjadinya *fraud*.
3. *Responsibility*. Prinsip ini akan menjauhkan BPR dari praktik yang tidak sehat karena prinsip ini menciptakan pengelolaan aset secara hati-hati (*prudent*) sehingga meminimalisir faktor-faktor pemicu terjadinya *fraud*.
4. *Independency*. Prinsip ini akan menciptakan pengelolaan BPR dengan benar. Setiap komponen dalam BPR akan bekerja secara profesional tanpa adanya tekanan (*pressure*) atau benturan kepentingan (*conflict of interest*). Prinsip kemandirian ini akan menciptakan komitmen yang tinggi dan budaya kerja yang jujur di BPR sehingga akan mencegah BPR dari *fraud*.
5. *Fairness*. Prinsip ini akan mencegah terjadinya praktik-praktik menyimpang seperti *fraud* yang dilakukan oleh manajemen yang akan dapat merugikan *stakeholder*, karena setiap *stakeholder* akan mengetahui secara detail seluruh informasi perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya. Dari hasil penelitian ini, disarankan:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian di daerah lain agar kesimpulan ini dapat lebih digeneralisasi untuk semua BPR di Indonesia. Selain itu,

peneliti lain dapat menambahkan variabel lain yang dapat menjadi faktor pencegah terjadinya *fraud* agar *fraud* di BPR tidak terjadi lagi.

2. Bagi objek penelitian, yaitu BPR di Surabaya agar menerapkan GCG secara berkelanjutan.
3. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan hasil penelitian penerapan prinsip-prinsip GCG terbukti dapat mencegah terjadinya *fraud* sehingga kebijakan OJK yang mewajibkan BPR menerapkan GCG adalah tepat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan yang optimal dari OJK agar BPR benar-benar menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan penuh tanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Albrecht *et al.* 2012. *Fraud Examination : Fourth Edition*. South-Western: Cengage Learning.
- Agarwal, Gopal Krishna dan Medury. 2013. *Good Governance -A Tool to Prevent Corporate Frauds*. *IRACST – International Journal of Commerce, Business and Management (IJCBM)*. ISSN: 2319–2828 Vol. 2, No.6, December 2013, 2(6), 317–327.
- Azriani, Zednita, Harianto, dan Nuryantono, Nunung. 2003. Peranan Bank Perkreditan Rakyat Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Sumatera Barat. *Forum Pascasarjana*, 31, pp.173–188.
- Banjarnahor, Donald. 2011. *Hampir 70% BPR Ditutup Karena Fraud*. (Online). (www.lppi.or.id. Diakses 07 April 2016)
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi SPSS. Cetakan IV*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Indriastuti, M., & Ifada, L. M. 2011. Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Corporate Governance Dan Kompleksitas Bank Terhadap Fraud. *Ekobis*. Vol.12, No.2, April 2011, 12(2), 168–176.
- In, M. 2015. *The Role of Corporate Governance in Fraud Reduction - A Perception Study in the Saudi Arabia Business Environment*. *Journal of Accounting and Finance*. Vol. 15(2) 2015, 15(2005), 119–128.
- Putri, I. G. A. M. A. D., Ulupui, I. G. K. A., & Wirawati, N. G. P. 1998. Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Budaya Tri Hita Karana Pada Kinerja Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12, 17–24.
- Sari, dkk. 2015. Pengaruh Efektifitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi Dan Implementasi *Good Governance* Terhadap Kecenderungan *Fraud*. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Volume 3, No.1.
- Setiawan, Raja Reno. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas, Implementasi *Good Corporate Governance* Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap *Fraud* Pada Perusahaan BUMN Di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*, 3(1), 1–15.
- Soleman, Rusman. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal Dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud*. *JAAI*. Vol. 17 No. 1, 17, 57–74.

- Sudarmo, M. M., T. Sawardi, A., & Agus Yulianto, Ak., M. A. 2009. *Fraud auditing*. Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2014. *Audit Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yoga, Paulus. 2016. *OJK : Tanpa GCG, Banyak BPR Lakukan Fraud*. (Online), (www.infobanknews.com. Diakses 01 Oktober 2016).
- Yudokusumo, A. B. 2014. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Di PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Juanda Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2, 1–11.